

REKAPITULASI LHKASN SAMPAI 8 APRIL 2020

NO.	SKPD	WAJIB LAPOR (PEJABAT STRUKTURAL NON LHKPN)	LAPORAN SUDAH FINAL DAN TERVERIFIKASI	LAPORAN DIKEMBALIKAN NAMUN BELUM DIPERBAIKI	BELUM LAPOR	KET / NAMA YANG BELUM FINAL/BELUM LAPOR
1	SEKRETARIAT DAERAH	31	31	0	0	100% OKE
2	INSPEKTORAT	5	5	0	0	100% OKE
3	SEKRETARIAT DPRD	9	9	0	0	100% OKE
4	BKPSDM	11	11	0	0	100% OKE
5	BAPPELTBANG	20	20	0	0	100% OKE
6	BADAN KEUANGAN	23	23	0	0	100% OKE
7	BPBD	4	4	0	0	100% OKE
8	DINAS PENDIDIKAN	20	20	0	0	100% OKE
9	DINAS KESEHATAN DAN UPTD2: - DINAS KESEHATAN (SKPD INDUK) - PUSKEMAS (7 UNIT) - UPTD INSTALASI FARMASI - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	11 7 2 2	11 7 2 2	0 0 0 0	0 0 0 0	ELFIANTI 100% OKE 100% OKE 100% OKE
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	14	14	0	0	100% OKE
11	DINAS PERHUBUNGAN DAN UPTD2: - DINAS PERHUBUNGAN (INSTANSI INDUK) - UPTD TERMINAL DAN PARKIR - UPTD PKB	11 2 2	11 2 2	0 0 0	0 0 0	100% OKE 100% OKE 100% OKE
12	DINAS SOSIAL	11	11	0	0	100% OKE
13	DINAS PUPR DAN UPTD2 : - DINAS PUPR (INSTANSI INDUK) - UPTD PERALATAN DAN PELENGKAPAN - UPTD PENERANGAN JALAN	19 2 2	19 2 2	0 0 0	0 0 0	100% OKE 100% OKE 100% OKE
14	DINAS PERKIM	11	11	0	0	100% OKE
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	11	0	0	100% OKE
16	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAN UPTD: - DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN (SKPD INDUK) - UPTD KEMETROLOGIAN	15 2	15 2	0 0	0 0	100% OKE 100% OKE
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	20	20	0	0	100% OKE

NO.	SKPD	WAJIB LAPOR (PELABAT STRUKTURAL NON LHKPN)	LAPORAN SUDAH FINAL DAN TERVERIFIKASI	LAPORAN DIKEMBALIKAN NAMUN BELUM DIPERBAIKI	BELUM LAPOR	KET / NAMA YANG BELUM FINAL/BELUM LAPOR
18	DINAS PEPUSTAKAN DAN KEARSIPAN	15	15	0	0	100% OKE
19	DINAS KEBAKARAN	11	11	0	0	100% OKE
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	26	26	0	0	100% OKE
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15	15	0	0	100% OKE
22	DP3APPKB	20	20	0	0	100% OKE
23	DPMPTSPPTK	30	30	0	0	100% OKE
24	SATUAN POLISI DAN PP	15	15	0	0	100% OKE
25	KESBANGPOL	4	4	0	0	100% OKE
26	KANTOR CAMAT MKS	8	8	0	0	100% OKE
27	KANTOR CAMAT GGP	8	8	0	0	100% OKE
28	KANTOR CAMAT ABTB	8	8	0	0	100% OKE
29	KELURAHAN DI WILAYAH MKS:					
	- Kelurahan Koto Selayan	4	4	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Kubu Gulai Banceh	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Manggis Ganting	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Puhun Pintu Kabun	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Puhun Tembok	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Pulau Anak Air	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Campago Guguk Bulek	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Campago Ipuh	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Garegeh	5	5	0	0	100% OKE
30	KELURAHAN DI WILAYAH GUGUK PANJANG:					
	-kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	5	5	0	0	100% OKE
	-Kelurahan Benteng Pasar Atas	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Bukit Apit Puhun	5	5	0	0	100% OKE
	-Kelurahan Bukit Cengang Kayu Ramang	5	5	0	0	100% OKE
	-Kelurahan Kayu Kubu	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Pakan Kurai	5	5	0	0	100% OKE
	- Tarok Dipo	5	5	0	0	100% OKE

NO.	SKPD	WAJIB LAPOR (PELABAT STRUKTURAL NON LHKPN)	LAPORAN SUDAH FINAL DAN TERVERIFIKASI	LAPORAN DIKEMBALIKAN NAMUN BELUM DIPERBAIKI	BELUM LAPOR	KET / NAMA YANG BELUM FINAL/BELUM LAPOR
31	KELURAHAN DI WILAYAH ABTB:					
	- Kelurahan Aur Kuning	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Belakang Balok	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Birugo	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Kubu Tanjung	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Ladang Cakiah	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Pakan Labuah	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Parit Antang	5	5	0	0	100% OKE
	- Kelurahan Sapiran	5	5	0	0	100% OKE
	JUMLAH KESELURUHAN	546	546	0	0	

Bukittinggi, 8 April 2020

Inspektur,



AMR, SE

NIP. 19620311 198603 1 004

QUESTION	ANSWER	MARKS	TOTAL MARKS
1. Explain the following terms: (a) Demand, (b) Supply, (c) Equilibrium, (d) Shortage, (e) Surplus.	<p>(a) Demand: The quantity of a good or service that consumers are willing and able to purchase at a given price and time.</p> <p>(b) Supply: The quantity of a good or service that producers are willing and able to sell at a given price and time.</p> <p>(c) Equilibrium: The point where the quantity demanded equals the quantity supplied.</p> <p>(d) Shortage: A situation where the quantity demanded exceeds the quantity supplied.</p> <p>(e) Surplus: A situation where the quantity supplied exceeds the quantity demanded.</p>	10	10
2. Draw a graph showing the relationship between price and quantity demanded. Label the axes and the curve.	<p>A graph showing the relationship between price (Y-axis) and quantity demanded (X-axis). The curve is downward sloping, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded.</p>	5	15
3. Explain the law of demand. Give an example to illustrate it.	<p>The law of demand states that, all else being equal, as the price of a good or service decreases, the quantity demanded increases. For example, if the price of apples decreases, more people will buy apples.</p>	5	20
4. Explain the law of supply. Give an example to illustrate it.	<p>The law of supply states that, all else being equal, as the price of a good or service increases, the quantity supplied increases. For example, if the price of oranges increases, more people will grow oranges.</p>	5	25
5. Explain the concept of equilibrium. How is it determined?	<p>Equilibrium is the point where the quantity demanded equals the quantity supplied. It is determined by the intersection of the demand curve and the supply curve.</p>	5	30
6. Explain the concept of shortage. How is it caused?	<p>Shortage is a situation where the quantity demanded exceeds the quantity supplied. It is caused by a decrease in supply or an increase in demand.</p>	5	35
7. Explain the concept of surplus. How is it caused?	<p>Surplus is a situation where the quantity supplied exceeds the quantity demanded. It is caused by an increase in supply or a decrease in demand.</p>	5	40

Page No. _____

Date _____

Signature _____

Teacher's Signature _____



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

- 1. Para Menteri Kabinet Kerja;**
- 2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;**
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;**
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
- 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;**
- 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;**
- 8. Para Gubernur; dan**
- 9. Para Bupati/Walikota.**

**di
Tempat**

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kami mengingatkan kembali bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran, sebagai berikut:



PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGANTARAN PASIEN KE RUMAH SAKIT

1977

- 1. Untuk menjamin keselamatan
- 2. Untuk menjamin kesehatan
- 3. Untuk menjamin kenyamanan
- 4. Untuk menjamin keamanan
- 5. Untuk menjamin ketertarikan
- 6. Untuk menjamin keserasuan
- 7. Untuk menjamin kesesuaian
- 8. Untuk menjamin kelengkapan
- 9. Untuk menjamin ketepatan

1977
Yogyakarta

PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGANTARAN PASIEN KE RUMAH SAKIT
MELALUI PERUSAHAAN
KEMAH KEMAH

KEHATI-HATI
MELALUI PERUSAHAAN KEMAH KEMAH
MELALUI PERUSAHAAN KEMAH KEMAH

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
tentang Pengantaran Pasien ke Rumah Sakit
melalui Perusahaan Kemah Kemah
Mencakup ketentuan-ketentuan mengenai
persyaratan, prosedur, dan tanggung jawab
dalam pengantaran pasien ke rumah sakit
melalui perusahaan kemah kemah.

1. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN;
2. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN;
3. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN;
4. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
5. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidapatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir;
 - b. Laporan tersebut disampaikan paling lambat:
 - 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
 - 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
3. Menugaskan APIP untuk:
 - a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
 - c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas;
 - d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated the 10th of January, 1862. It contains a report on the state of the State, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

2. The second part of the document is a report from the Board of Education, dated the 15th of January, 1862. It contains a report on the state of the schools, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

3. The third part of the document is a report from the Board of Agriculture, dated the 20th of January, 1862. It contains a report on the state of the agriculture, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

4. The fourth part of the document is a report from the Board of Commerce, dated the 25th of January, 1862. It contains a report on the state of the commerce, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

5. The fifth part of the document is a report from the Board of Finance, dated the 30th of January, 1862. It contains a report on the state of the finance, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

6. The sixth part of the document is a report from the Board of Health, dated the 5th of February, 1862. It contains a report on the state of the health, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

7. The seventh part of the document is a report from the Board of Education, dated the 10th of February, 1862. It contains a report on the state of the schools, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

8. The eighth part of the document is a report from the Board of Agriculture, dated the 15th of February, 1862. It contains a report on the state of the agriculture, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

9. The ninth part of the document is a report from the Board of Commerce, dated the 20th of February, 1862. It contains a report on the state of the commerce, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

10. The tenth part of the document is a report from the Board of Finance, dated the 25th of February, 1862. It contains a report on the state of the finance, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

11. The eleventh part of the document is a report from the Board of Health, dated the 30th of February, 1862. It contains a report on the state of the health, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

12. The twelfth part of the document is a report from the Board of Education, dated the 5th of March, 1862. It contains a report on the state of the schools, and a recommendation that the Governor should call a special session of the Legislature.

- e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.
4. Peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN;
 5. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada:
 - a. Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya;
 - b. Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara.

Kami mengharapkan salinan kebijakan ini disampaikan kepada kami selambat-lambatnya pada 30 Juni 2015. Kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks RB.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

ttd

Yuddy Chrisnandi

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.

2. The second part of the report deals with the economic situation and the development of the various branches of the economy.

3. The third part of the report deals with the social situation and the position of the various social classes.

4. The fourth part of the report deals with the political situation and the position of the various political parties.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation and the position of the various cultural groups.

6. The sixth part of the report deals with the international situation and the position of the country in the world.

General Information
The following information is given:

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.